



Judul : Paket UU Politik - Bola di Tangan Presiden dan para Ketum Parpol
Tanggal : Senin, 06 Januari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

PAKET UU POLITIK

Bola di Tangan Presiden dan para Ketum Parpol

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu. Putusan tersebut tidak akan punya makna besar apabila tidak diikuti penyempurnaan sistem pemilu.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan penghapusan ambang batas hanyalah salah satu bagian dari pembahasan penyempurnaan sistem pemilu. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan DPR segera

memulai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. Revisi tiga undang-undang yang dikenal sebagai paket undang-undang politik itu sudah masuk Prolegnas Prioritas 2025. "Sekarang 'bola' ada di tangan Presiden dan para ketua umum parpol untuk bisa menyegerakan agenda pembahasan revisi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik," ujarnya.

Secara terpisah, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menyebut rekayasa konstitusional berupa per-

ubahan UU Pemilu yang diamanatkan putusan MK tersebut perlu memperhatikan sejumlah hal, di antaranya dengan mengatur lebih ketat persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Selain itu, verifikasi perlu dilakukan objektif dan tanpa toleransi bagi parpol yang tak memenuhi syarat administrasi dan faktual. "Yang juga perlu dipertimbangkan jalah syarat *parliamentary threshold*, baik soal besaran maupun lingkup keberlakuan," sebutnya.

Di lain pihak, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Fir-

man Noor menilai putusan MK yang menghapus *presidential threshold* sangat positif bagi masyarakat karena membuka peluang calon alternatif sehingga kandidat terbaik juga akan bermunculan.

Akan tetapi, penghapusan itu belum tentu akan dimanfaatkan parpol. "Karena partai pasti berhitung. Mungkin kadernya belum layak. Mereka kan juga tidak mau ikut pilpres menguras dana dan tenaga, tapi peluang menang tidak besar. Mereka akan berpikir berulang kali," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif

Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden akan menjadi tantangan bagi parpol. Menurutnya, parpol akan didorong menjadi lembaga yang memproduksi kader berkualitas dan diinginkan masyarakat. "Selama ini partai selalu mengatakan tempat kaderisasi, produksi kepemimpinan. Nah, ini saatnya. Jangan hanya gagah-gagahan memproduksi kader, tapi tidak berani mengusung calon sendiri. Tapi saya kira tidak banyak partai yang punya nyali di 2029 nanti," ujarnya. (Faj/X3)